



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SILA H. PULUNGAN, S.H., M.Hum.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEP. BANGKA BELITUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 19 Agustus 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

  
SILA H. PULUNGAN, S.H., M.Hum.  
JAKSA UTAMA MADYA  
NIP. 19680416 199303 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH.

  
MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA  
NIP. 19750508 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.473.804.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp6.981.563.000
	Jumlah	Rp8.455.367.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



*Sila H. Pulungan*  
SILA H. PULUNGAN, S.H., M.Hum.  
JAKSA UTAMA MADYA  
NIP. 19680416 199303 1 001

Koba, 19 Agustus 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,



MUHAMMAD HUSAINI, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA  
NIP. 19750508 200012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BANIARA MANGAPUL SINAGA  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HUSAINI  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



MUHAMMAD HUSAINI

BANIARA MANGAPUL SINAGA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

#### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

#### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	50%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	20%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Perkantoran dengan volume sebanyak 1 (satu) layanan yang meliputi: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran; Kebutuhan Biaya Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Langganan Daya dan Jasa; Pemeliharaan Kantor, Penggantian Barang Inventaris; Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran.	Rp. 6.683.563.000
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan volume 1 (satu) layanan berupa Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang meliputi: Pengembangan Sistem Informasi (Simkari) dan CMS Penyusunan Renja / Laporan Keuangan/LKJ Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu; Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi; Kegiatan In House Training, Pembinaan Mental dan Kesegaran Jasmani;	Rp. 75.500.000
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 205.000.000
Jumlah		Rp. 6.964.063.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Mendukung Penguatan Sumber Daya Manusia
- Mendukung Penguatan Reformasi Birokrasi
- Mendukung Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

## E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Koba, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

MUHAMMAD HUSAINI

BANIARA MANGAPUL SINAGA



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IVAN GAUTAMA S  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HUSAINI  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

MUHAMMAD HUSAINI

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

IVAN GAUTAMA S



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>N o</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	10%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	10%
3	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase pelaksanaan Operasi	

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	40%

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp. 30,000,000
2		Rp. 40,000,000
3	Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 30,000,000
4	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58,008,000
5	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20,000,000
6	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 38,976,000
7	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 52,400,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 229.384.000</b>

#### **D. PRIORITAS NASIONAL**

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

MUHAMMAD HUSAINI

IVAN GAUTAMA S





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VARISKA ARDINA KODRIANSYAH  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HUSAINI  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,



MUHAMMAD HUSAINI

VARISKA ARDINA KODRIANSYAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70%
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		pada tahap pra penuntutan	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 61.632.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 153.120.000
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 117.428.000
4	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 6.280.000
Jumlah		Rp. 338.460.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Meningkatkan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.

- Meningkatkan Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,

MUHAMMAD HUSAINI

VARISKA ARDINA KODRIANSYAH



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG DHEDI DWI HANDES  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HUSAINI  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERIBANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

MUHAMMAD HUSAINI

AGUNG DHEDI DWI HANDES

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	30%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	75%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	75%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	75%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	3.8

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 29.240.000
2	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 463.460.000
3.	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksaaan Eksekusi Pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 23.000.000
4.	Restrorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah	Rp. 5.095.000
	Jumlah	Rp. 520.795.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Mendukung Penguatan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan penyandang Disabilitas.
- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

MUHAMMAD HUSAINI

AGUNG DHEDI DWI HANDES





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINUL ARIFIN  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HUSAINI  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

MUHAMMAD HUSAINI

ZAINUL ARIFIN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 50.400.000
Jumlah		Rp. 50.400.000

**D. PRIORITAS NASIONAL**

- Mendukung penguatan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba
- Mendukung peningkatan nilai tambah di dalam negeri terkait hilirasasi dan industrialisasi.

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Koba, 12 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANGKA TENGAH,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

MUHAMMAD HUSAINI

ZAINUL ARIFIN